

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM TERTIB ADMINITRASI AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

Wawan Saputra B.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Email: wawansaputra23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tertib administrasi akta kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode kualitatif. Informan dipilih berdasarkan informasi internal dan eksternal yang benar-benar memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Analisis data kualitatif ditulis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tertib administrasi akta kematian di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dilihat dari produktivitas, kualitas pelayanan, daya tanggap dan tanggung jawab masih belum berjalan optimal. Tindakan yang disarankan penulis untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tertib administrasi akta kematian adalah penyesuaian peraturan kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan program yang lebih fokus pada akta kematian, membuat tim monitoring lapangan selaku supervisor, menjadikan layanan melalui website atau aplikasi di satu sisi yang memudahkan dan juga meningkatkan kualitas layanan informasi.

Kata Kunci: Akta Kematian, Kinerja.

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Department of Population and Civil Registry of Kaur Regency, Bengkulu Province in carrying out orderly administration of death certificates. This study uses an exploratory approach with qualitative methods. Informants are selected based on internal and external information who really understand the problems that occur in the field. Qualitative data analysis was written descriptively. The results of this study indicate that the performance of the Department of Population and Civil Registration in the orderly administration of death certificates in Kaur Regency, Bengkulu Province in terms of productivity, service quality, responsiveness and responsibility is still not running optimally. The actions suggested by the author to improve the performance of the Population and Civil Registration Office in the orderly administration of death certificates are adjusting population and civil registration regulations, preparing programs that focus more on death certificates, making field monitoring teams as supervisors, making services through websites or applications on the one hand which facilitates and also improves the quality of information services.

Keywords: *Death Certificate, Performance.*

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat seseorang dilahirkan. Pada Umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat seseorang dilahirkan (dilahirkan) hingga seseorang meninggal (kematian). Peristiwa kelahiran hingga kematian seseorang akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang sangat penting baik untuk dirinya

sendiri maupun orang-orang yang ditinggalkannya. Maka dari itu, penting akan adanya tanda bukti dari dalam kependudukan hukum agar mudah untuk mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Dalam hal ini Negara berkewajiban memberikan perlindungan sosial dan mengakomodir hak penduduk terhadap pengurusan dokumen kependudukan merupakan salah satu masalah kompleks didalam kehidupan sehari-hari salah satu akibat dari perkembangan masyarakat yang semakin pesat yaitu adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sangat mengharapkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai yang diharapkan.

Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh instansi Pelaksanaan oleh UPTD instansi pelaksana. Semangat otonomi daerah pada saat ini, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kaur mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Provinsi di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok di bidang kependudukan dan catatan sipil tersebut, maka sangat dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan produktivitas kerja yang tinggi, memiliki motivasi atau semangat kerja dan disiplin kerja yang tinggi.

Berdasarkan data penduduk Kabupaten Kaur yang sudah tercatat di administrasi Dukcapil Kabupaten Kaur pada tahun 2017 jumlah laki-laki 67.118 jiwa, sedangkan perempuan 62.725 jiwa, dan pada tahun 2018 jumlah laki-laki 67.400 jiwa sedangkan perempuan 62.866 jiwa, dan pada tahun 2019 jumlah Laki-laki 71.170 jiwa sedangkan perempuan 66.744 jiwa dari keseluruhan rekapitulasi tahun 2017 adalah 129,843 jiwa sedangkan tahun 2018 adalah 130266 jiwa, dan tahun 2019 jumlah keseluruhan 137914 dengan ini peneliti dapat melihat dari jumlah penduduk per tiga tahun meningkat. Dalam hal ini penullis meneliti tentang akta kematian, karena menurut data yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Jumlah penduduk yang meninggal dari tahun 2018-2019, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 543 jiwa (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur).

Tabel 1 Laporan Pencatatan Akta Kematian Kabupaten Kaur Januari-Desember Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa Perkecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019
			Laporan Akta Kematian	
1	Kinal	14	20 jiwa	5 jiwa
2	Tanjung Kemuning	20	8 jiwa	12 jiwa
3	Kaur Utara	11	10 jiwa	6 jiwa
4	Kaur Tengah	9	7 jiwa	13 jiwa
5	Kaur Selatan	19	59 jiwa	27 jiwa
6	Maje	19	45 jiwa	15 jiwa
7	Nasal	17	25 jiwa	24 jiwa
8	Semidang Gumay	13	34 jiwa	21 jiwa
9	Kelam Tengah	13	11 jiwa	8 jiwa
10	Luas	12	15 jiwa	17 jiwa
11	Muara Sahung	7	30 jiwa	10 jiwa
12	Tetap	12	39 jiwa	31 jiwa
13	Lungkang Kule	9	29 jiwa	20 jiwa
14	Padang Guci Hilir	9	36 jiwa	6 jiwa
15	Padang Guci Hulu	11	24 jiwa	4 jiwa
Jumlah		195 Desa	332 jiwa	211 jiwa

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Kaur dalam angka 2018-2019

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat akta kematian disebabkan oleh kurang kreatifnya perangkat Dinas untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya akta kematian. Masyarakat juga berpandangan pengurusan akta kematian hanya untuk pengurusan warisan bagi orang yang mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu berpandangan akta kematian itu tidak diperlukan, karena tidak ada harta warisan yang ingin diwariskan kepada anak cucunya. Keberadaan sarana dan prasarana kerja yang mendukung dan peraturan-peraturan yang mengacu pada peningkatan pelayanan dan disiplin kerja juga sangat dibutuhkan. Sebagai polesan terakhir adalah pola pengawasan yang tepat yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya, serta tingkat kepuasan masyarakat.

Selain dari sarana dan prasarana yang belum memadai dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti sinyal internet yang belum memadai, listrik masih sering mati, kendaraan operasional untuk melaksanakan sosialisasi belum memadai, dapat dilihat dari data sarana prasarana Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur pada tahun 2018-2019:

Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2018-2019

No	Nama Barang	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Jumlah		Keadaan Barang	Jumlah		Keadaan Barang
		Dibutuhkan	Tersedia		Dibutuhkan	Tersedia	
1	Bangunan Gedung Lokal	2	1	Butuh Renovasi	2	1	Butuh Renovasi
2	Kendaraan Dinas						
	-Roda Empat	2	1	Baik	2	1	Baik
	-Roda Dua	12	11	Baik	15	10	Baik
3	Mesin Ketik	1	-	-	2	-	-
4	Meja Kerja	20	16	Baik	24	19	Baik
5	Kursi Kerja	60	48	Baik	75	60	Baik
6	Almri Berkas	15	9	Baik	15	8	Baik
7	AC	2	1	Baik	3	1	Baik
8	Komputer	20	15	Baik	20	11	Baik
9	Printer	20	16	Baik	20	8	Baik
10	Proyektor	1	1	Baik	1	1	Baik
11	Laptop	10	9	Baik	10	8	Baik
12	Wireles Public Adress	2	1	Baik	1	1	Baik
13	Kamera	4	2	Baik	4	2	Baik
14	Ruang Tunggu Pelayanan	1	-	-	-	-	-

Sumber: Disdukcapil Kabupaten kaur, 2018-2019.

Dari tabel diatas bias dilihat dengan sarana prasarana dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kaur masih sangat belum memadai dengan kapasitas 15 Kecamatan dan 195 Desa dengan hal ini yang membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum maksimal melayani masyarakat dalam hal tertib administrasi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan berbagai data berupa observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tahapan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246), yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

C. HASIL PENELITIAN

Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Tertib Administrasi Akta Kematian Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan melihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek Produktivitas

Pencapaian aspek produktivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur selama ini belum sepenuhnya tercapai. Kedepannya bisa sesuai dengan harapan, dengan meningkatkan proses pelayanan terhadap masyarakat dalam meningkatkan tertib administrasi di kabupaten kaur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kaur juga meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawainya, dengan meningkatkan disiplin ini semuanya berharap dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kaur.

2. Aspek Kualitas Layanan

Kualitas layanan dalam pelayanan akta kematian dikatakan baik apabila sesuai dengan harapan dan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Masyarakat sangat ingin layanan yang berkualitas dari organisasi pemerintah. Kesulitannya adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan itu berbeda-beda. Oleh karena itu, walaupun pelayanan yang diberikan telah dilakukan secara optimal kepada masyarakat, tetapi masih tetap saja ada keluhan bahwa kualitas layanan belum memuaskan.

Dalam aspek kualitas layanan yang di jalankan di Kabupaten Kaur masih memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan baik dari segi sarana dan prasarana, dan sumber daya aparatur pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, hal ini juga di akibatkan karna masih kurangnya sumber daya penunjang baik dari sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya sumber daya aparatur yang ada di dinas.

3. Aspek Responsivitas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur masih memiliki kekurangan yaitu kotak saran untuk masyarakat di Kantor tersebut tidak ada terdapat kotak saran sehingga masyarakat susah untuk memberikan masukan terhadap pelayanan yang ada di Dinas tersebut. Masalah keluhan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur masih kurang responsif dari Dinas Tersebut karena tidak tersedianya kotak Saran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat yang merupakan bahan referensi perbaikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kaur.

4. Aspek Responsibilitas

Pelayanan penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sudah memenuhi prosedur yang benar dengan regulasi yang benar secara Nasional. Sehingga administrasi yang diterbitkan oleh Dinas tersebut suatu saat tidak akan mempunyai masalah dalam pembuatan kecuali dari masyarakat itu sendiri yang salah memberikan data tidak benar. Akta Kematian merupakan salah satu dokumen Kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Secara umum akta kematian dipandang oleh masyarakat sebagai suatu hal yang harus di penuhi apabila keluarga ada yang meninggal untuk memenuhi syarat tertib administrasi dan mempermudah pendataan penduduk. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Kaur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut

diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggara kebijakan bidang pendaftaran penduduk;
- b. Penyelenggara kebijakan bidang pencatatan sipil;
- c. Penyelenggara pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. Penyelenggara perkembangan kependudukan;
- e. Penyelenggara perencanaan kependudukan;
- f. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok

Berdasarkan pada hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dalam tertib administrasi akta kematian di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu:

1. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tertib administrasi akta kematian di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dilihat dari Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas masih kurang maksimal.
2. Faktor pendukung dan penghambat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tertib administrasi akta kematian di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu adalah:
 - a. Faktor Pendukung sebagai berikut:
 - 1) Adanya sosialisasi lebih sering kepada masyarakat pedalaman dan jauh dari kantor
 - 2) Adanya partisipasi dari kepala desa, tokoh masyarakat dalam tertib administrasi akta kematian.
 - 3) Penambahan anggaran untuk Disdukcapil.
 - 4) Penambahan pegawai untuk Disdukcapil.
 - b. Faktor penghambat sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pegawai yang ada di Kantor Disdukcapil masih kurang baik itu ASN maupun honorer.
 - 2) Ketersediaan anggaran yang sangat minim, sehingga masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pedalaman atau yang jauh dari Kantor Disdukcapil.
 - 3) Tingkat kesadaran masyarakat tentang akta kematian masih sangat rendah, sehingga dibutuhkan jemput bola.
 - 4) Tumpang tindih tupoksi terhadap pegawai yang lain sehingga membuat kinerja di Dukcapil kurang maksimal.
 - 5) Sarana dan prasarana di Disdukcapil masih sangat kurang.
 - 6) Masih ada kesenjangan antara masyarakat menengah keatas dan menengah kebawah dalam pelayanan.
 - 7) Pegawai yang masih ada belum disiplin waktu.
3. Peningkatan Kinerja dalam mengatasi hambatan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tertib administrasi akta kematian di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu adalah:
 - a. Mengatasi Kekurangan Jumlah Pegawai
Untuk mengatasi kekurangan Jumlah pegawai, upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur adalah mengajukan permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk penambahan pegawai terutama dalam memenuhi jabatan struktural di Bidang Pencatatan Sipil. Selain itu, pegawai struktural yang akan mengisi kekurangan pegawai haruslah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya di bidang tersebut.

b. Mengatasi Rendahnya Kompetensi Pegawai

Aparatur sebagai penggerak dalam suatu organisasi, tentunya harus memiliki kompetensi yang baik demi menunjang proses pencapaian suatu tujuan organisasi. Salah satu hambatan dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran adalah rendahnya kompetensi pegawai di instansi pelaksana pelayanan.

c. Mengatasi Kekurangan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mengatasi kekurangan sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengajukan permohonan pengadaan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan komputerisasi, termasuk pembangunan jaringan internet, dan mempunyai mesin listrik sendiri (Ginset) untuk mengatasi apabila ada pemadaman listrik sehingga kegiatan pelayanan tetap bisa berjalan di Dinas Dukcapil Daerah Kabupaten Kaur.

d. Mengatasi Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka mencapai peningkatan kepemilikan akta kematian, partisipasi masyarakat dalam mendukung dan berperan aktif dalam penerbitan akta kematian sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat dilihat dari adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan atau melaporkan peristiwa kematian keluarga maupun kerabat, keikutsertaan dalam pemberian saran-saran maupun masukan bagi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dalam penerbitan akta kematian, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas pemberian sosialisasi kepada masyarakat dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan peristiwa penting kematian. Sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus secara terjadwal dan terus berkelanjutan. Selain itu perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi yang menyangkut syarat-syarat, mekanisme, dan prosedur secara benar, serta regulasi yang berlaku. Sehingga Kinerja Dinas Dukcapil dapat ditingkatkan melalui aspek, Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas.
2. Berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, maka perlu dilakukan peningkatan anggaran di Dinas Dukcapil untuk mendukung, penyediaan sarana dan prasarana. Salah satunya yaitu faktor kenyamanan dalam proses pelayanan di kantor dinas. Perlu adanya penyediaan ruang tunggu yang memadai bagi masyarakat yang akan melakukan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, pemeliharaan lingkungan kantor agar terlihat bersih dan asri, dan penambahan loket-loket pelayanan. Pimpinan instansi perlu memberikan peringatan dan pemberian sanksi (*punishment*) bagi pegawai yang tidak atau kurang disiplin dalam pelaksanaan kegiatan keseharian. Memberikan penghargaan (*reward*) bagi pegawai yang telah disiplin kerja dan kinerja individual yang baik. Selain itu, pimpinan harus selalu berusaha untuk menunjukkan keteladanan dalam pemberian bimbingan bagi bawahan.
3. Permohonan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan struktural dalam bidang pencatatan sipil dan jabatan struktural yang lain.
4. Pembuatan bagan prosedur berupa gambar atau spanduk dan ditempel di ruangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

D. KESIMPULAN

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dalam hal tertib administrasi akta kematian belum berjalan dengan baik dan efektif karena keterbatasan tenaga yang profesional serta sarana prasarana yang kurang memadai. Ini juga terjadi karena

kurangnya anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sehingga belum tercapainya masyarakat yang tertib administrasi akta kematian. Hal tentu bisa berdampak buruk pada kehidupan masyarakat yang mana dalam penggunaan informasi orang lain. Untuk mendorong masyarakat dalam tertib administrasi akta kematian serta meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, maka harapan penulis dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran dan solusi yang tepat dalam mengatasi tertib administrasi akta kematian di kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, M. (2019). Faktor Penghambat dan Pendukung Pembuatan Akta Kematian. *Jl_MILD (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)*, 10(1).
- Fahmi, I. (2010). *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Ilham, M. (2008). *Manajemen Sumber Daya dan Kinerja Aparatur Sipil Pemerintahan Daerah*. Bandung: Indra Prahasta.
- Kaban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Labolo, M. (2008). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Prasad.
- Mulyana, Y. (2017). Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, 19(2), 140-148.
- Prawirosentono, S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sinambela, L. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soleh, C., & Suripto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Soeprihantono, J. (1988). *Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.